

Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia

Septiana Tri Susanti¹, Ambya², Prayudha Ananta³, I Wayan Suparta⁴, Asih Murwiati⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 22, 2025
Revised Juni 22, 2025
Accepted Juni 24, 2025

Kata Kunci:

Kriminalitas,
Ketimpangan Pendapatan,
Kemiskinan,
Pendidikan.

Keywords:

Crime,
Income Inequality,
Poverty,
Education.

ABSTRAK

Kriminalitas merupakan salah satu isu sosial yang terus menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan data panel dari 32 provinsi selama tahun 2014 hingga 2023. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kriminalitas. Sementara itu, kemiskinan dan pendidikan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan akses lapangan kerja dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode panel dinamis guna mengatasi potensi endogenitas antar variabel, serta mempertimbangkan penambahan variabel lain atau pendekatan lintas negara untuk memperluas cakupan analisis.

ABSTRACT

Crime is one of the social issues that continues to be a challenge in various countries, including Indonesia. This study aims to analyze the influence of income inequality, poverty levels, and education levels on crime rates in Indonesia. The research design employed is quantitative, utilizing panel data from 32 provinces spanning the years 2014 to 2023. The data sources used are secondary data obtained from publications by the Central Bureau of Statistics (BPS). The findings indicate that income inequality has a positive but insignificant effect on crime rates. Meanwhile, poverty and education are found to have a positive and significant impact on crime rates. These findings suggest that economic pressures and the mismatch between educational attainment and job market access may drive individuals to engage in criminal behavior. Further research is recommended to employ dynamic panel methods to address potential endogeneity among variables, as well as consider adding additional variables or adopting a cross-country approach to expand the scope of analysis.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

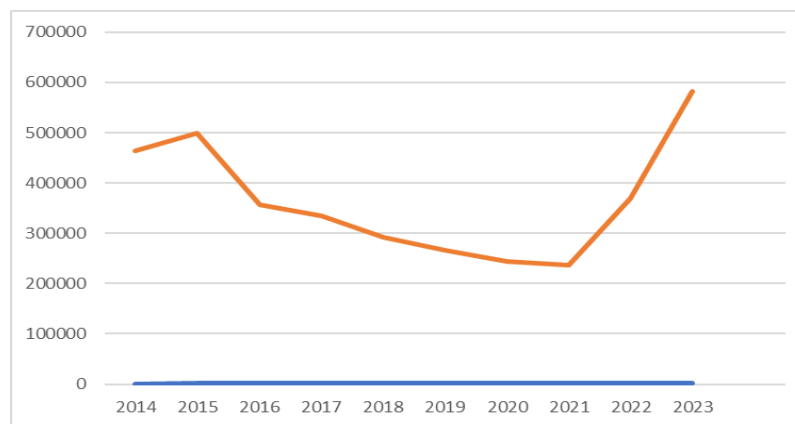
Septiana Tri Susanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
Bandar Lampung, Indonesia
Email: septisusanti45@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kriminalitas atau perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan, norma sosial, dan perundang-undangan yang berlaku [1]. Tindakan kriminal bisa merugikan orang lain, baik secara fisik, materi, maupun psikologis [2]. Perilaku kriminal dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat konvensional seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan, maupun yang lebih modern seperti kejahatan siber, dan pencucian uang. Keragaman bentuk kriminalitas tersebut menunjukkan bahwa tindakan kriminal tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan zaman dan dinamika sosial. Perkembangan teknologi, pergeseran nilai, serta meningkatnya kompleksitas sosial menjadi pemicu munculnya bentuk-bentuk kriminalitas baru yang memerlukan perhatian dan pendekatan penanganan yang berbeda dari masa sebelumnya.

Masalah kriminalitas merupakan tantangan global yang dihadapi oleh berbagai negara, baik itu negara maju, negara berkembang, maupun negara berpenghasilan rendah, termasuk Indonesia [3]. Aksi kejahatan tidak hanya mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap kestabilan ekonomi dan tatanan sosial. Tingkat keamanan suatu masyarakat umumnya sejalan dengan frekuensi tindak kejahatan yang terjadi, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi pula rasa aman yang dirasakan oleh warga [4].

Permasalahan kriminalitas di Indonesia hingga kini masih menjadi isu yang kompleks dan krusial, mencerminkan berbagai tantangan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, peredaran narkoba, hingga kejahatan terorganisir terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada menurunnya rasa aman masyarakat, tetapi juga turut menghambat stabilitas sosial dan memperlambat laju pembangunan ekonomi. Ketika masyarakat terus-menerus hidup dalam ketakutan terhadap aksi kekerasan dan kriminalitas, maka secara perlahan kepercayaan terhadap institusi hukum dan negara bisa melemah.



Gambar 1. Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan Tahun 2014-2023

Dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2023, tren kriminalitas di Indonesia menunjukkan pola yang tidak stabil dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada awal periode tersebut, jumlah kasus kejahatan mengalami peningkatan, namun setelahnya menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap selama beberapa tahun. Tren penurunan ini berlangsung hingga tahun 2021, sebelum kemudian terjadi peningkatan yang cukup tajam pada dua tahun berikutnya. Perubahan pola ini mencerminkan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, serta memerlukan perhatian lebih dalam upaya pengendalian dan pencegahannya.

Masalah ekonomi sering kali menjadi pemicu munculnya tindakan kriminal dalam masyarakat. Tekanan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pendidikan membuat sebagian individu sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya [5]. Dalam kondisi tersebut, kejahatan kerap

dijadikan jalan pintas oleh mereka yang merasa tidak memiliki pilihan lain, terlebih ketika akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial sangat terbatas.

Ketimpangan pendapatan menciptakan jurang sosial yang tajam antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Ketika kesenjangan ekonomi semakin melebar, kelompok yang merasa tertinggal cenderung mengalami frustrasi karena tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Kondisi ini dapat memicu perasaan marah dan ketidakpuasan yang pada akhirnya mendorong sebagian individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk ekspresi atau upaya pemenuhan kebutuhan secara tidak sah. Dalam konteks ini, kejahatan menjadi salah satu bentuk respons terhadap ketidakseimbangan sosial yang dirasakan.

Selain ketimpangan pendapatan, kemiskinan juga menjadi faktor krusial yang mendorong meningkatnya angka kriminalitas. Individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali dihadapkan pada keterbatasan ekonomi, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan [6]. Situasi yang penuh tekanan ini dapat memicu perilaku menyimpang sebagai jalan pintas untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, kondisi ekonomi yang serba kekurangan dapat memperbesar kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak kriminal, terutama kejahatan-kejahatan yang bersifat ekonomis seperti pencurian atau perampokan.

Rendahnya tingkat pendidikan juga memiliki kaitan erat dengan kecenderungan seseorang melakukan tindakan kriminal. Pendidikan memainkan peran penting dalam kemampuan negara berkembang dalam mengasimilasi teknologi kontemporer dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan [7]. Pendidikan yang minim membatasi kemampuan individu untuk memahami norma hukum, mengakses pekerjaan yang layak, dan mengembangkan keterampilan hidup yang sehat secara sosial. Kurangnya pendidikan juga berpotensi melemahkan kontrol diri dan daya pikir kritis dalam mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi alat pencegah kriminalitas melalui pembentukan moral, etika, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuciswara et al. (2021) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa urbanisasi dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas, namun ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Penelitian lainnya oleh Wicaksono & Suharto (2023) menunjukkan hasil dimana kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas di Yogyakarta. Sementara itu, penelitian oleh Soraya et al. (2024) menunjukkan bahwa di Indonesia kemiskinan dan pendidikan tidak mempengaruhi kriminalitas. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa dinamika kriminalitas tidak dapat dijelaskan secara tunggal dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memasukkan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pendidikan dalam satu model analisis, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia dalam kurun waktu 2014–2023.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup periode tahun 2014 hingga 2023. Data dikumpulkan dari 32 provinsi di Indonesia dan diperoleh dari lembaga resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Penggunaan data panel memungkinkan analisis yang menggabungkan dimensi waktu (*time series*) dan perbandingan antarwilayah (*cross-section*), sehingga mampu menangkap dinamika kriminalitas secara lebih mendalam dan menyeluruh. Variabel independen penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kejahatan.

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber
Tingkat kriminalitas	CR	Kasus/100.000 penduduk	BPS
Ketimpangan Pendapatan	KP	Indeks	BPS
Tingkat Kemiskinan	POOR	Persen	BPS
Tingkat Pendidikan	EDU	Tahun	BPS

Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$CR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 CR_{i,t} + \beta_2 KP_{i,t} + \beta_3 POOR_{i,t} + \beta_4 EDU + \varepsilon_{i,t}$$

Dalam analisis data panel, menggunakan salah satu dari tiga model utama antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Sebelum melangkah ke analisis utama, penting untuk menguji validitas dan keandalan model tersebut. Ini dilakukan melalui beberapa uji asumsi standar, seperti uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas.

Pemilihan model yang paling sesuai dilakukan setelah serangkaian uji asumsi dasar menunjukkan bahwa model memenuhi syarat kelayakan. Proses ini melibatkan beberapa uji spesifikasi, antara lain uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah CEM atau FEM lebih tepat digunakan. Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk membandingkan antara FEM dan REM. Apabila hasil uji Chow dan Hausman memberikan rekomendasi model yang berbeda, maka uji Lagrange Multiplier digunakan sebagai penentu akhir untuk memilih antara CEM dan REM.

Setelah mengidentifikasi model optimal, serangkaian uji hipotesis, seperti uji-t dan uji-F, dilakukan. Pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen ditentukan menggunakan uji-t. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah koefisien regresi setiap variabel signifikan secara statistik. Sementara itu, uji-F mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi pada saat yang sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Skewness	Kurtosis
CR	0,9436	1,4349
KP	0,0070	-0,3884
POOR	1,0382	0,6288
EDU	0,2616	0,1558

Uji normalitas dilakukan menggunakan pendekatan skewness dan kurtosis, dengan ketentuan bahwa data dianggap berdistribusi normal apabila nilai skewness berada dalam kisaran -2 sampai +2, distribusi data juga dikatakan normal apabila nilai kurtosisnya berada dalam rentang yang sama, yaitu antara -2 hingga +2 [8]. Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel CR, KP, dan EDU memenuhi kriteria asumsi normalitas.

3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	CR	KP	POOR	EDU
CR	1,0000			
KP	0,1083	1,000		
POOR	0,2432	0,2715	1,000	
EDU	0,1403	-0,1298	-0,5005	1,000

Jika matriks korelasi antar variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,85, model regresi dianggap multikolinear. Hasil uji Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai korelasi kurang dari 0,85. Karena tidak ada korelasi yang sangat kuat antara variabel independen, dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas dari masalah multikolinearitas.

3.3 Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi

Adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam sebuah model regresi memang tidak akan menyebabkan bias pada estimator parameternya, yang tetap konsisten. Namun, masalah utamanya adalah estimator tersebut kehilangan efisiensinya atau tidak lagi memiliki ragam terbaik. Menurut Wooldridge (2013), meskipun estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam kondisi ini tetap tidak bias dan konsisten, *standard error* yang dihasilkan menjadi bias. Bias pada *standard error* ini, yang bisa berupa estimasi yang terlalu rendah (underestimasi) atau terlalu tinggi (overestimasi), dapat mengganggu validitas uji statistik seperti Uji T dan Uji F, sehingga berisiko membawa pada penarikan kesimpulan yang keliru.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, pendekatan *robust standard error* digunakan sebagai alternatif dari *standard error* konvensional. Penggunaan *robust standard error* mampu mengoreksi efek heteroskedastisitas dan autokorelasi, serta meningkatkan akurasi dan validitas hasil estimasi [9]. Dalam konteks analisis data panel, metode ini juga mudah diimplementasikan, misalnya dengan menambahkan perintah *robust* saat menggunakan perangkat lunak Stata.

3.4 Pemilihan Model Terbaik

Tabel 4. Hasil Pemilihan Model

	Prob.	Kesimpulan
Uji Chow	0,0000	REM
Uji Hasuman	0,6274	REM
Uji Lagrange Multiplier	0,0000	REM

Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05 sehingga terpilih model FEM. Akan tetapi, uji Hausman menunjukkan bahwa REM lebih tepat daripada FEM karena nilai probabilitas 0,6274 lebih besar dari 0,05. Selain itu, uji Lagrange Multiplier, yang memiliki nilai probabilitas 0,0000, mendukung pemilihan REM daripada CEM. Oleh karena itu, model REM adalah yang paling cocok untuk penelitian ini.

3.5 Hasil Regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Prob.
C	-190,6813	133,7741	-1,43	0,154
KP	247,9157	221,1592	1,12	0,262
POOR	5,0169	1,7115	2,93	0,003
EDU	25,9235	11,3222	2,29	0,022
Prob > F				0,0096
R-squared				0,1459

3.5.1 Uji t-statistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif namun tidak signifikan antara ketimpangan pendapatan (kp) memiliki probabilitas $0,262 > 0,05$. Dengan probabilitas $0,003 < 0,05$ untuk variabel tingkat kemiskinan (poor), dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan. Tingkat pendidikan diketahui memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan karena variabel tingkat pendidikan (*edu*) memiliki probabilitas $0,022 < 0,05$.

3.5.2 Uji F-statistik

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai statistik F adalah $0,0096 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa, dari tahun 2014 hingga 2023, faktor-faktor kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan tingkat pendidikan secara bersamaan berdampak signifikan terhadap kejahatan di Indonesia.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai yang diperoleh untuk koefisien determinasi (R^2) adalah 0,1459. Berdasarkan angka ini, variabel independen model dapat menjelaskan sekitar 14,59% dari variasi variabel dependen, yaitu tingkat kejahatan. Dengan kata lain, faktor-faktor yang tidak tercakup dalam model ini masih menjelaskan sebagian besar variasi tingkat kejahatan. Meskipun belum dominan, nilai ini tetap menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut telah membantu menjelaskan fenomena kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami dinamika kejahatan secara lebih menyeluruh, variabel lain yang mungkin lebih relevan harus diperhitungkan.

3.6 Pembahasan Hasil Penelitian

3.6.1 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan menurunkan tingkat kejahatan, tetapi efek ini tidak signifikan secara statistik. Artinya, meskipun koefisien menunjukkan arah hubungan yang sejalan dengan teori *strain*, yakni semakin tinggi ketimpangan maka kecenderungan kriminalitas meningkat, tetapi pengaruhnya tidak cukup kuat untuk disimpulkan sebagai faktor penentu utama dalam model ini. Temuan ini sejalan dengan studi Kuciswara et al. pada tahun 2021 yang tidak menemukan hubungan antara kejahatan di Jawa Timur dan ketimpangan pendapatan [10]. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor penengah seperti mekanisme redistribusi pendapatan, efektivitas bantuan sosial, atau kekuatan norma sosial yang menekan potensi konflik. Selain itu, hubungan antara ketimpangan dan kriminalitas bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga variabel lain seperti pengangguran, kepadatan penduduk, atau kualitas layanan publik juga turut berperan dalam membentuk dinamika kriminalitas. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan memang memiliki kontribusi, tetapi tidak secara langsung dan signifikan dalam memengaruhi angka kriminalitas selama periode penelitian.

3.6.2 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Kriminalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan secara positif dan signifikan memengaruhi tingkat kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya tindak pidana meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Rahmalia et al. pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia [11]. Temuan ini juga selaras dengan berbagai teori ekonomi dan sosial yang menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu pendekatan yang dapat menjelaskan hubungan ini adalah teori ekonomi kejahatan yang dikemukakan oleh Becker pada tahun 1968, di mana individu akan mempertimbangkan manfaat dan risiko ketika memutuskan untuk melakukan tindakan kriminal, dan dalam kondisi kemiskinan, potensi manfaat dari kejahatan dapat dianggap lebih besar dibanding risikonya [12]. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan berperan signifikan dalam mendorong angka kriminalitas, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi sangat relevan

tidak hanya dari sisi kesejahteraan, tetapi juga sebagai strategi dalam menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat.

3.6.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kriminalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan suatu wilayah meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murialti & Hadi pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan mendorong tingginya angka kriminalitas di Provinsi Riau [13]. Hasil ini mungkin tampak bertolak belakang dengan pandangan umum yang menyatakan bahwa pendidikan dapat menjadi alat pencegah kejahatan melalui peningkatan kesadaran hukum, moralitas, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Namun, dalam konteks tertentu, peningkatan pendidikan tidak selalu sejalan dengan tersedianya kesempatan kerja yang memadai, sehingga individu berpendidikan yang menghadapi pasar kerja yang sempit dapat mengalami kekecewaan dan frustrasi sosial [14]. Kondisi ini dapat mendorong sebagian dari mereka untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan kriminal yang lebih terorganisir, termasuk kejahatan intelektual atau kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, meskipun pendidikan secara teoritis diharapkan menurunkan tingkat kejahatan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa diimbangi dengan distribusi kesempatan kerja yang proporsional, pendidikan justru dapat menjadi faktor risiko dalam dinamika kriminalitas.

4. KESIMPULAN

Dari hasil studi data panel di 32 provinsi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023 dapat disimpulkan bahwa kemiskinan secara signifikan dan positif memengaruhi tingkat kejahatan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar pula kecenderungan terjadinya tindakan kriminal, sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong individu melakukan kejahatan. Selain itu, pendidikan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan yang tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi dapat menimbulkan frustrasi sosial dan potensi penyimpangan. Sementara itu, variabel lain seperti ketimpangan pendapatan belum menunjukkan pengaruh signifikan, yang menandakan perlunya kajian lebih lanjut terkait dinamika sosial dan ekonomi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kriminalitas sebaiknya tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga memperhatikan kualitas serta keterkaitannya dengan struktur pasar kerja dan mobilitas sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel tambahan serta memperluas cakupan wilayah guna memperdalam pemahaman terhadap determinan kriminalitas di Indonesia. Untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, disarankan untuk menggunakan metode panel dinamis guna mengatasi potensi permasalahan endogenitas antar variabel yang mungkin memengaruhi ketepatan estimasi dan validitas hasil penelitian.

REFERENSI

- [1] Nairobi, N., Ambya, A., Amanda, A. H., & Afif, F. Y. (2021). Criminality and Poverty in Sumatra. *Media Ekonomi*, 29(1), 53–62. <https://doi.org/10.25105/me.v29i1.9876>
- [2] Frieze, I. H., Greenberg, M. S., & Hymer, S. (1987). *Describing the Crime Victim : Psychological Reactions to Victimization*. 18(4), 299–315.
- [3] Soraya, N., Nurfikri, M. A., Rafi, A., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023 Data Registrasi Polri Kejadian Kejahatan Di Indonesia Periode 2012-2023 Menurut Statistik Kriminalit. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 270–284.

- [4] Socha, R. (2021). Sense of Security and Crime: The Residents' Perspective. *European Research Studies Journal*, XXIV(Special Issue 4), 501–511. <https://doi.org/10.35808/ersj/2784>
- [5] Simanungsong, N. A. (2013). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Journal of Economic and Strategic Management*, 2(2).
- [6] Amalia, S. Della, Ratih, A., Emalia, Z., & Usman, M. (2024). Perbedaan Pola Konsumsi Pangan Dan Non Pangan Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan Dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi Kasus : Di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung). 5(2), 745–756.
- [7] Fauzianti, N., & Suparta, I. W. (2024). *Economics and Digital Business Review Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten / Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2022*. 5(2), 367–376.
- [8] George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step. In *IBM SPSS Statistics 23 Step by Step*. <https://doi.org/10.4324/9781315545899>
- [9] Ananta, P., Kamal, M. E. bin M., & Mohamed, N. (2023). Public Spending, Corruption, and Human Development: Empirical Evidence in Middle-Income Countries. *Proceedings of the International Conference in Technology, Humanities and Management (ICTHM 2023), 12-13 June, 2023, Istanbul, Turkey*, 131, 561–579. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.48>
- [10] Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1–9. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- [11] Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap kriminalitas Di Indonesia. 1(1), 21–36.
- [12] Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. In *The American Journal of Surgery* (Vol. 92, Issue 3). [https://doi.org/10.1016/S0002-9610\(56\)80126-8](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(56)80126-8)
- [13] Murialti, N., & Hadi, M. F. (2023). Analisis Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Dengan Pendekatan Data Panel. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 56–64. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4874>
- [14] Gök, A. (2021). The role of higher education on corruption: comparison of European Union and African Union. In *Handbook of Research on Institution Development for Sustainable and Inclusive Economic Growth in Africa* (pp. 28–38). IGI Global Scientific Publishing.